

ELEMEN SUKSES PENERAPAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

ELEMENTS OF SUCCESSFUL APPLICATION OF POPULATION ADMINISTRATION INFORMATION SYSTEM

Safitri Nur Laili, Arimurti Kriswibowo*

Prodi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

*Koresponden email: arimurti.adne@upnjatim.ac.id

ABSTRAK

Banyaknya jumlah penduduk di Indonesia membuat adanya berbagai permasalahan kependudukan. Salah satu masalahnya adalah persebaran penduduk yang tidak merata yang disebabkan karena adanya urbanisasi penduduk dari desa ke kota yang mengharuskan masyarakat untuk memperbarui atau melaporkan data kependudukannya. Pembaruan dan pelaporan data kependudukan dilakukan untuk membuat data kependudukan valid dan masyarakat menjadi lebih tertib administrasi. Untuk melakukan pembaruan atau pemutakhiran data kependudukan pemerintah telah menerapkan SIAK untuk konsolidasi yang dapat membantu mengenai pendaftaran kependudukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui elemen sukses penerapan SIAK untuk konsolidasi NIK dan untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung penerapan SIAK untuk konsolidasi NIK di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian yang ditemukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto menunjukkan bahwa adanya support dari pemerintah dengan dibuatnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan sosialisasi kepada birokrat selaku pelaksana SIAK dan sosialisasi kepada masyarakat. Sedangkan pada capacity dan value menunjukkan dengan adanya SIAK ini cukup baik dalam penerapannya, hanya saja untuk infrastruktur masih kurang. Adapun kendala yang ditemui yaitu adanya trouble pada saat penggunaan SIAK.

Kata kunci: *E-Government, Pelayanan Publik, Kependudukan, SIAK.*

ABSTRACT

The large number of people in Indonesia creates various population problems. One of the problems is the uneven distribution of the population due to the urbanization of the population from villages to cities, which requires people to update or report their population data. Updates and reports on population data are carried out to make population data valid and the public to be more administratively orderly. To update or update population data, the government has implemented SIAK for consolidation which can help with population registration. This study aims to determine the elements of successful application of SIAK for NIK consolidation and to determine the inhibiting and supporting factors for implementing SIAK for NIK consolidation at the Population and Civil Registration Office of Mojokerto City. This study uses qualitative research with data collection techniques through interviews, observation, and documentation. The results of the research found at the Population and Civil Registration Office of the City of Mojokerto showed that there was support from the government with the issuance of Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 95 of 2019 concerning the Population Administration Information System and socialization to bureaucrats as SIAK implementers and socialization to the community. Meanwhile, the capacity and value shows that the SIAK is quite good in its implementation, but the infrastructure is still lacking. The obstacles encountered were the presence of trouble when using SIAK.

Keywords: *E-Government, Public Service, Population, SIAK.*

PENDAHULUAN

Salah satu negara berkembang yang memiliki jumlah penduduk yang sangat besar adalah Indonesia. Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan, yang mempunyai persebaran penduduk yang tidak merata. Salah satu akibatnya adalah munculnya berbagai permasalahan kependudukan seperti adanya data kependudukan yang tidak valid. Apabila ketidak validan data dibiarkan

begitu saja, maka pertumbuhan negara akan semakin sulit. Hal ini yang menjadi pertimbangan pemerintah untuk terus berupaya dan bertindak untuk mengambil sebuah kebijakan terhadap permasalahan kependudukan tersebut.

Dari uraian diatas, kebijakan dalam permasalahan kependudukan menjadi penting bagi pemerintah untuk memperoleh data administrasi kependudukan. Untuk menyikapi permasalahan

tersebut, maka pemerintah diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat dengan cara melakukan sosialisasi untuk menyadarkan pentingnya mengupdate data kependudukan pada setiap peristiwa kependudukan yang terjadi. Tujuan dari adanya administrasi kependudukan yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang sadar dan tertib administrasi. Untuk itu segala informasi mengenai data kependudukan akan dijadikan sebagai acuan dasar dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam pemerintahan, pembangunan, ataupun kemasyarakatan.

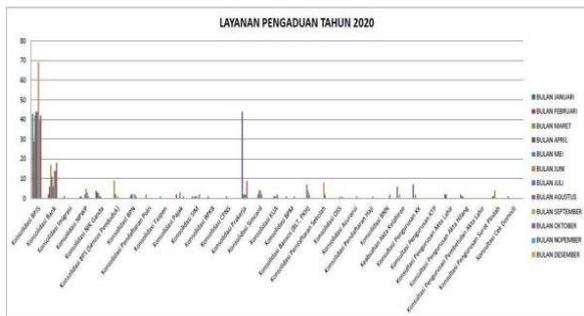
Untuk mendapatkan catatan tertulis dari setiap kejadian atau peristiwa penting kependudukan, maka setiap warga negara harus mendaftarkan peristiwa atau kejadian pada lembaga catatan sipil. Catatan sipil merupakan lembaga yang dibentuk pemerintah yang memiliki tugas untuk membuat pencatatan, penerbitan, penyimpanan, dan pemeliharaan data kependudukan selengkap mungkin pada setiap kejadian penting bagi status keperdataan seorang warga negara seperti kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, dan penggantian nama.

Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan adanya pemutakhiran data kependudukan. Pemutakhiran data kependudukan untuk saat ini dapat dilakukan melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Sistem informasi ini menggunakan teknologi sebagai data informasi untuk memberikan fasilitas dalam pengelolaan administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan juga instansi pelaksana. SIAK juga dapat diartikan sebagai kerangka kerja data elektronik yang disusun berdasarkan metodologi dan menggunakan standarisasi khusus yang difokuskan pada penataan kerangka kerja administrasi di bidang kependudukan dengan tujuan agar terlaksananya tertib administrasi dan juga dapat membantu petugas pemerintahan daerah khususnya Disdukcapil dalam menertibkan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil (Nugroho & Warsono, 2012). Beberapa pemanfaatan SIAK di antaranya akan mempermudah untuk mencatat seluruh peristiwa kependudukan dan memperoleh data kependudukan secara cepat dan akurat.

Data yang dirangkum dalam SIAK akan diperbarui dan diterbitkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) oleh pemerintah pusat. Segala data dan informasi kependudukan akan tersimpan di *database* kependudukan. Dalam hal ini seluruh data yang telah diperbarui dapat digunakan untuk pemanfaatan perencanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Adanya pem-

baruan *database* kependudukan bertujuan agar hasil dari pembaruan dapat dimanfaatkan secara optimal. Dengan diterapkannya SIAK secara terpusat maka database kependudukannya ada di Server Ditjen Dukcapil Kemendagri RI dan database kependudukan menjadi satu database (Perpres Nomor 39 Tahun 2019 satu data Indonesia) sehingga data semakin valid, aman dan Disdukcapil menjadi valid.

Namun pada kenyataannya, masih terdapat beberapa permasalahan yang terjadi seperti adanya ketidaksesuaian data penduduk pemilik NIK, tidak dapat menggunakan NIK untuk keperluan pengadministrasian dikarenakan NIK masih belum *online* atau tidak *terupdate* di SIAK data pusat, dan juga data NIK ganda. Salah satu Disdukcapil yang memiliki permasalahan tersebut adalah di Disdukcapil Kota Mojokerto. Dalam hal ini penulis masih menemukan cukup banyak data pengaduan yang ditujukan. Sementara, Kota Mojokerto termasuk kota kecil yang memiliki luas 0,70 km² dengan jumlah penduduk 126.404 jiwa (Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, 2021). Hal ini dibuktikan dengan masih adanya masyarakat yang melapor di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto yang mengeluhkan permasalahan tidak dapat menggunakan NIK sebagaimana mestinya untuk keperluan administratif seperti pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Bank, Imigrasi, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), NIK ganda, Badan Pusat Statistik (sensus penduduk), Badan Pertanahan Nasional (BPN), Pendaftaran Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen), Pajak, Surat Izin Mengemudi (SIM), Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Prakerja, *Simcard*, Kantor Urusan Agama (KUA), Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat (BPM), Bansos (Bantuan Langsung Tunai, Program Keluarga Harapan), Pendaftaran sekolah, *Online Single Submission* (OSS), Asuransi, Pendaftaran haji, Badan Narkotika Nasional (BNN), Keabsahan Akta Kelahiran, Pengurusan Kartu Keluarga, Pengurusan Kartu Tanpa Penduduk, Pengurusan Akta Lahir, Pengurusan Akta Hilang, Pengurusan Pembetulan Akta Lahir, Pengurusan Surat Pindah, Cek Domisili. Terdapat 31 permasalahan administrasi kependudukan terkait konsolidasi NIK. Berikut merupakan data pelayanan pengaduan di Disdukcapil Kota Mojokerto terkait hal pengaduan NIK pada tahun 2020:



Gambar 1. Laporan Layanan Pengaduan Tahun 2020

Berdasarkan laporan data di atas, menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa keluhan terkait NIK yang masih bermasalah dan belum bisa digunakan untuk keperluan pengadministrasian. Pelayanan *online* yang disediakan untuk pengadministrasian kependudukan dapat diakses melalui *WhatsApp*. Berikut merupakan nomor yang dapat dihubungi untuk melakukan pengaduan terhadap keluhan NIK yang tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya untuk keperluan pengadministrasian:



Gambar 2. Nomor Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto

Seluruh pelayanan administrasi kependudukan dilaksanakan secara *online* ini mulai dari diberlakukannya PSBB. Menurut Indrajit dalam Muliawaty & Hendryawan, (2020), definisi *e-government* yang lebih mudah bahwa *e-government* adalah pemanfaatan inovasi data yang mengharuskan pemerintah untuk mengubah hubungan dengan masyarakat, dan pengertian lain *e-government* adalah adanya pemanfaatan internet untuk menyelesaikan masalah pada pemerintahan dan juga penyedia pelayanan publik sehingga menjadi lebih baik dan lebih berorientasi pada pelayanan untuk masyarakat. Menurut Indrajit

(2012) dalam Chaharani, Adi, & Hasmi (2020) menyatakan *e-government* ialah suatu bentuk aplikasi pengerjaan tugas dan tata pelaksanaan pemerintahan dengan menggunakan bantuan teknologi telematika atau teknologi informasi dan komunikasi. Dari beberapa definisi *e-government* yang berbeda di atas, dapat diberikan kesimpulan bahwa *e-government* adalah peman-faatan inovasi data secara elektronik melalui internet pada organisasi pemerintahan yang tidak memiliki batas untuk mengoptimalkan pelayanan publik yang memiliki kecakapan, transparan, dan efektif (Aprianty, 2016).

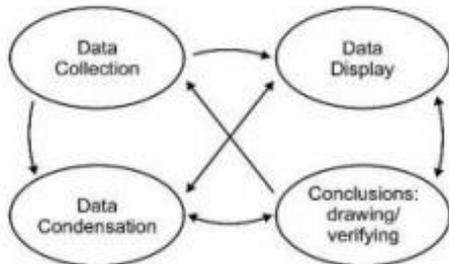
Oleh karena itu, pemanfaatan *e-government* dalam pencatatan data kependudukan akan membantu dalam mempermudah pelayanan publik yang ada dengan program SIAK yang ada di Disdukcapil Kota Mojokerto. Hal ini juga berlaku untuk masalah pengaduan atau keluhan yang ada mengenai NIK. Dalam pelayanan kependudukan, pemerintah berupaya untuk menerapkan *e-government* untuk segala pelayanan publik yang menggunakan teknologi informasi seperti SIAK untuk memberikan kemudahan kepada pemerintah pemberi pelayanan dan juga memudahkan masyarakat dalam penerima layanan agar dapat memberikan kualitas pelayanan yang efektif dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan. Maka dengan adanya *digital government* atau pemerintahan digital ini, pemerintah dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik untuk menciptakan transparansi publik mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penerapan *e-government* dalam rangka melaksanakan *good government* merupakan salah satu bentuk yang harus diwujudkan agar kualitas pelayanan administrasi publik terus mengalami peningkatan dalam pemberian data informasi untuk masyarakat dan mendesak pemerintah untuk lebih efektif dalam memberikan data atau informasi tersebut.

Selain itu dengan adanya sistem digitalisasi yang tepat dapat mendorong tata kelola pemerintahan menjadi lebih efektif dan efisien. Oleh karena itu, pemerintah melakukan berbagai upaya agar dapat terus berkembang untuk tumbuh menjadi lebih dalam pemanfaatan teknologi (Azizah & Kriswibowo, 2021). Hal ini dapat diraih dengan cara melakukan penataan kembali sistem pemerintahannya. Salah satunya yaitu adanya penerapan *e-government*. Terlepas dari hal tersebut, tujuan dari adanya penerapan *e-government* adalah untuk mencapai suatu tatanan pemerintahan yang lebih baik (*good governance*) (Oktavya, 2015).

Setiani & Maesaroh, (2018) menjelaskan bahwa Penerapan *e-government* diharapkan mempermudah penyelenggaraan pemerintah yang baik dengan memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi dengan cepat, tepat, mudah dan sederhana. Meskipun penerapan pemerintahan yang sudah berbasis digital seperti SIAK telah dilaksanakan, apabila tidak didukung dengan adanya SDM yang cukup dan tidak memiliki *skill* atau keahlian dalam penerapan digital maka hal ini dapat menjadikan salah satu faktor yang menghambat pemanfaatan sistem yang berbasis digital (Nur, 2019).

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang akan mendeskripsikan dan menggambarkan secara detail terkait fenomena atau permasalahan yang terjadi. Dalam penelitian ini, teknik penentuan informan menggunakan *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data menurut Miles et al., (2014) yang melalui beberapa tahap meliputi:



Gambar 3. Teknik Analisis Data

Uji keabsahan berdasarkan atas sejumlah kriteria yang meliputi *credibility*, *transferability*, *dependability* dan *confirmability*. Dalam penelitian ini uji keabsahan yang digunakan adalah uji *credibility* (kepercayaan) dengan menggunakan teknik triangulasi yang terdiri dari sumber, teknik, dan waktu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

NIK merupakan salah satu data yang terangkum di SIAK. Penggunaan NIK biasanya digunakan untuk keperluan pengadministrasian pelayanan publik. Masyarakat sebagai pengguna NIK untuk berbagai keperluan pelayanan diatas yang tidak dapat digunakan atau data yang dimunculkan tidak valid menyebabkan masyarakat tidak dapat melakukan keperluan seperti yang telah disebutkan. Hal ini biasanya mengharuskan

masyarakat untuk melakukan konsolidasi NIK ke Disdukcapil guna memperbaiki data atau *update* data kependudukannya. Oleh karena itu perlunya *update* data kependudukan adalah untuk mensinkronasikan data yang telah masuk di SIAK untuk diperbarui kembali dari data lama menjadi data baru apabila ada perubahan domisili atau mengalami data ganda. Dalam hal ini SIAK menjadi wadah seluruh data kependudukan yang berbasis elektronik yang dikemas dalam bentuk aplikasi. Dalam penerapannya, dibutuhkan adanya elemen yang mendukung suksesnya penerapan SIAK yang menjadi kunci keberhasilan penerapan SIAK. Untuk mengukur tingkat keberhasilan atau kesuksesan dalam penerapan SIAK di Disdukcapil Kota Mojokerto, penulis mengukur dengan menggunakan hasil kajian dan riset dari *Harvard JFK School of Government* Indrajit, (2016) yang menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang dapat menjadi kunci sukses dalam penerapannya diantaranya, *support*, *capacity*, dan *value*.

1. Support

a. Adanya visi dan Misi.

Dengan adanya visi dan misi yang ada dalam penerapan SIAK untuk konsolidasi NIK di Disdukcapil Kota Mojokerto akan menjadikan salah satu kunci sukses yang dapat mendorong tercapainya pelayanan publik. Pada hasil penelitian yang telah dilakukan kepada kepala bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan menyatakan:

“Kalau berbicara tentang e-government itu intinya ada dipelayanan. Kalau sudah berbicara pelayanan, pastinya harus pelayanan mudah, cepat, dan gratis. Jadi intinya untuk pelayanan yang lebih baik.”
(Hasil wawancara 15 Maret 2022)

Maka dalam hal ini Disdukcapil Kota Mojokerto memiliki visi dan misi untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan konsolidasi NIK sehingga masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan pelayanan yang cepat dan gratis. Dalam hal ini, masyarakat dapat menggunakan kembali NIK nya untuk keperluan pengadministrasian berbagai pelayanan. Oleh karena itu, visi dan misi yang ada pada Disdukcapil Kota Mojokerto sangat mempengaruhi kesuksesan dalam penerapan SIAK untuk konsolidasi NIK.

b. Adanya superstruktur pendukung (seperti adanya Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah)

Penerapan SIAK di Disdukcapil Kota Mojokerto berdasarkan hasil penelitian yang

diperoleh menunjukkan bahwa adanya pedoman atau acuan dalam penerapan dan pemanfaatan SIAK yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Adapun tujuan dari SIAK pada Permendagri No 95 tahun 2019 pasal 2 yang berbunyi "SIAK bertujuan untuk: (a) meningkatkan kualitas pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; (b) menyediakan data dan informasi skala nasional dan daerah mengenai hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang akurat, lengkap, dan mutakhir; dan (c) mewujudkan pertukaran data secara sistemik melalui sistem pengenalan tunggal dengan tetap menjamin kerahasiaan data". Dalam hal ini SIAK sangat berperan menjadi wadah untuk segala data kependudukan yang dapat menerbitkan nomor tanda pengenalan yang bersifat tunggal, unik yang berupa Nomor Induk Kependudukan atau yang biasa disebut dengan NIK. Pada SIAK ini akan menghasilkan data kependudukan yang mutakhir sehingga dapat digunakan masyarakat untuk keperluan pengadministrasian. Dengan demikian, penerapan SIAK untuk konsolidasi NIK di Disdukcapil Kota Mojokerto telah didukung dengan adanya peraturan yang mengatur tentang SIAK.

c. Adanya sosialisasi

Pada poin ini sosialisasi sangat penting guna menerapkan pemerintahan berbasis digital atau *e-government* yang dapat menciptakan pelayanan publik yang lebih baik. Penerapan bentuk *e-government* yang berupa SIAK merupakan salah satu wujud mencapai suatu tata pemerintahan yang baik (*good governance*) (Oktavya, 2015). Oleh karena itu, penting adanya sosialisasi kepada kalangan birokrat agar dapat diterapkan sesuai dengan prosedur yang telah dijelaskan.

"Jadi kalau sosialisasi biasanya kita lebih ke aturannya, pada aturannya terus pada pelayanannya, terus pada tekniknya. Nanti kalau jika NIK nya itu tidak bisa diakses dipelayanan publik lainnya, misalnya di per Bank an atau dan lain-lain jadi kita sosialisasi disitu." (Hasil wawancara 30 Maret 2022)

Dalam hal ini, adanya sosialisasi terkait penerapan SIAK pada Disdukcapil Kota Mojokerto tidak hanya pada penerapannya saja tetapi juga dilakukan sosialisasi terkait peraturan-peraturan yang berlaku, sosialisasasi

terkait pelayanan masyarakat dan prosedur pelayanan, serta sosialisasi kepada masyarakat terkait konsolidasi NIK tersebut. Dengan demikian, sosialisasi tentang penerapan SIAK dan sosialisasi untuk konsolidasi NIK telah dilakukan Disdukcapil Kota Mojokerto.

2. *Capacity*

a. Ketersediaan sumber daya finansial.

Sumber daya finansial merupakan sumber daya yang berupa anggaran keuangan. Pada penerapan SIAK ini menurut hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa penerapan SIAK tidak membutuhkan pengeluaran anggaran yang banyak sebagaimana diperoleh penjelasan dari pelaksana SIAK di Disdukcapil Kota Mojokerto

"kalau sumber daya untuk penerapan SIAK sih sudah cukup, sudah bisa berjalan dengan baik. Apalagi sekarang semua serba online, jadi tidak membutuhkan biaya atau sumber daya finansial yang berarti. Sekarang konsolidasi juga online, jadi ya tidak ada biaya yang harus dikeluarkan pada saat menerapkan SIAK untuk konsolidasi." (Hasil Wawancara 30 Maret 2022)

Hal ini dikarenakan dalam penerapan SIAK untuk konsolidasi NIK semua dilakukan secara online. Dengan adanya sistem online ini yang menjadikan biaya anggaran tidak membutuhkan pengeluaran yang berarti pada saat melakukan konsolidasi. Hal ini berarti Disdukcapil Kota Mojokerto dalam menerapkan SIAK untuk konsolidasi NIK tidak mengeluarkan anggaran yang besar.

b. Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi

Ketersediaan infrastruktur menjadi salah satu poin suksesnya penerapan SIAK. Tanpa adanya infrastruktur dalam menunjang pelaksanaan SIAK, maka dalam penerapannya tidak akan dapat berjalan sesuai dengan konsep yang dibuat.

"untuk infrastruktur pc sudah pasti, terus jaringan. Kalau berbicara infrastruktur yang terpenting itu aplikasinya. Aplikasinya langsung dari pusat di instal di pc namanya SIAK terpusat." (Hasil wawancara 15 Maret 2022)

Infrastruktur yang ada pada Disdukcapil Kota Mojokerto dalam penerapan SIAK untuk konsolidasi NIK antara lain yang paling penting yaitu program aplikasi SIAK, selanjutnya ada pc atau komputer, jaringan internet, dan tablet. Untuk pc atau komputer yang tersedia dalam pengelolaan SIAK hanya terdapat 2 unit

pc dan 1 unit tablet untuk pelayanan konsolidasi NIK yang terdapat di Disdukcapil Kota Mojokerto. Dalam hal ini ketersediaan pc di Disdukcapil Kota Mojokerto berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan masih dirasa kurang karena jumlah pc yang tersedia hanya 2 unit. Apabila pc mengalami masalah, maka tidak dapat menjalankan program SIAK dengan baik sesuai perolehan hasil dari narasumber di Disdukcapil Kota Mojokerto.

c. Ketersediaan sumber daya manusia.

Untuk memaksimalkan penerapan SIAK untuk konsolidasi NIK, maka dibutuhkan sumber daya manusia yang mampu menjalankan atau mengoperasikan SIAK. Untuk mengoperasikan SIAK, adb pada Disdukcapil Kota Mojokerto akan dilakukan pelatihan dan pendampingan dari pusat.

“kalau berbicara ketersediaan sumber daya itu yang ada yang harus dimaksimalkan. Kalau berbicara tenaga sdmnya itu ya, cuma dua. Kurang atau tidak kurang pasti kurang. Tapi ya bagaimana kita mengoptimalkan, karena kita hanya punya tenaga itu hanya dua. Kalau berbicara ketersediaan sdm kurang ya pasti kurang, terus tidak ada standart misalnya Kabupaten/ Kota dengan penduduk sekian harus punya adb sekian engga. Jadi ya seadanya dikelola dengan baik aja gitu.” (Hasil wawancara 15 Maret 2022)

Sumber daya manusia pada bidang PIAK memiliki 2 sumber daya manusia yang mengelola SIAK untuk konsolidasi NIK di Disdukcapil Kota Mojokerto. Dalam hal ini SDM yang dimiliki Disdukcapil Kota Mojokerto berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan masih kurang. Untuk mengatasinya Disdukcapil Kota Mojokerto terus mengupayakan untuk dapat mengoptimalkan SDM yang dimiliki, karena tidak adanya standart untuk menentukan jumlah adb.

3. Value

Untuk menentukan besar tidaknya manfaat yang diperoleh dengan adanya penerapan *e-government* yang berupa SIAK bukan hanya dari kalangan pemerintah sendiri, melainkan masyarakat dan mereka yang berkepentingan (*demand side*) (Indrajit, 2016). Dalam hal ini manfaat yang dirasakan oleh Disdukcapil Kota Mojokerto dalam penerapan SIAK untuk konsolidasi NIK berdasarkan hasil penelitian menunjukkan:

“kalau manfaat yang dirasakan pasti data kependudukan akan semakin valid. Kalau data kependudukannya ini sudah valid, otomatis semua pelayanan akan berjalan dengan baik. Karena semuanya itu untuk semua pelayanan itu by NIK. Dan potensi untuk terjadinya kebocoran data sangat minim.” (Hasil wawancara 30 Maret 2020)

Pada hasil diatas maka diperoleh kejelasan tentang manfaat SIAK pada instansi pelaksana yaitu data menjadi lebih valid sehingga dapat menjadikan pelayanan berjalan baik, pelayanan yang dilakukan juga semakin mudah dan cepat sehingga tidak membutuhkan proses yang lama dan berbelit. Dengan adanya penerapan SIAK untuk konsolidasi NIK ini menjadikan keamanan data kependudukan lebih terjamin atau dengan kata lain potensi untuk terjadinya kebocoran data sangat kecil karena telah menggunakan SIAK terpusat. Selain itu dengan adanya penerapan SIAK untuk Konsolidasi NIK dapat memberikan kemajuan pembangunan. Sedangkan untuk manfaat yang dirasakan masyarakat penerima layanan konsolidasi NIK berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh yaitu masyarakat lebih dimudahkan dalam mengurus konsolidasi NIK dalam artian proses pelayanan yang diberikan menjadi cepat dan tidak berbelit, tetapi ditemukan juga beberapa pelayanan NIK yang sudah tidak melayani konsolidasi sebelum jam kerja selesai.

SIMPULAN

Suksesnya penerapan SIAK untuk konsolidasi NIK dengan dibuktikannya bahwa adanya *support* dukungan dari pemerintah yang berupa visi dan misi untuk mensukseskan penerapan SIAK, adanya dukungan superstruktur yang berupa peraturan-peraturan yang membahas mengenai SIAK yang terdapat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, serta adanya sosialisasi yang dilakukan pada kalangan birokrat untuk menerapkan SIAK dan sosialisasi kepada masyarakat dalam hal melakukan konsolidasi NIK. Sedangkan elemen *capacity* menunjukkan adanya sumber daya finansial dalam penerapan SIAK akan tetapi tidak mengeluarkan anggaran yang banyak karena dilakukan secara online, tersedianya infrastruktur dalam penerapan SIAK sehingga dapat menjadi penunjang dalam pelaksanaan SIAK, adanya sumber daya manusia yang cukup pada penerapan SIAK dengan cara memaksimalkan sumber daya yang ada secara optimal. Sedangkan elemen *value*

menunjukkan manfaat yang dirasakan oleh Disdukcapil Kota Mojokerto dalam penerapan SIAK diantaranya data yang digunakan menjadi lebih valid sehingga pelayanan berjalan baik, keamanan data lebih terjamin dan meminimalisir adanya kebocoran data dan juga membantu kemajuan pembangunan. Manfaat yang dirasakan oleh masyarakat yaitu proses pelayanan menjadi lebih mudah dan tidak membutuhkan waktu yang lama pada saat proses konsolidasi.

REFERENSI

- Aprianty, D. R. (2016). Penerapan Kebijakan E-Government Dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Sambutan Kota Samarinda. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(4).
- Azizah, N.-, & Kriswibowo, A. (2021). Penerapan e-Management Sebagai Bentuk Efisiensi Tata Kelola Organisasi Pada Yayasan Ponpes Al -Idris Surabaya. *JATI EMAS (Jurnal Aplikasi Teknik Dan Pengabdian Masyarakat)*, 5(3), 87.
- Chaharani, N. A., Adi, T. P., & Hasmi, D. L. (2020). Penerapan Aplikasi Pendaftaran Antrian Paspur Online (Apapo) dalam Perspektif E-Government. *Jurnal Kebijakan PIndrajit*, R. E. (2016). *Konsep Dan Strategi Electronic Government*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis*. California: SAGE Publications, Inc.
- Muliawaty, L., & Hendryawan, S. (2020). Peranan E-Government dalam pelayanan publik (Studi kasus: Mal pelayanan publik Kabupaten Sumedang). *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 11(2), 102.
- Nugroho, P. A., & Warsono, H. (2012). Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 1(2).
- Nur, B. (2019). Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palopo. *Journal I La Galigo | Public Administration Journal*, 2(1).
- Oktavya, Ayu Aditya. (2015). Penerapan (Electronic Government) E-Government Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Dalam Pemberian Pelayanan Di Kota

- Bontang. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 3(3).
- Perkotaan, P. P. K. (2021). Profil Kota Mojokerto. Retrieved from Basis Data Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan website: <http://perkotaan.bpiw.pu.go.id/v2/kota-sedang/36>
- Setiani, Y. A., & Maesaroh. (2018). Analisis Pengembangan E-Government Di Kabupaten Kendal. *Jurnal Tinjauan Kebijakan Publik Dan Manajemen*, 7(3).